



EDISI SELASA 11 AGUSTUS 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Balik Nama Tanah Ditargetkan Maksimal 10 Hari
Mulai 17 Agustus

05

NUSANTARA
Babak Baru Kematian Sutrimo, Eks Karumga Febrie Adriansyah
Makam Segera Dibongkar, Muncul Nama Febrio

10

LISTSTYLE
Bedah Makeup 4 Member No Na di MV 'Honk!'

SIMALAKAMA OJOL BERSTATUS UMKM

Iming-iming KUR tapi Nilai THR Tak Diatur

Impian sekitar 2,5 juta pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia untuk meraih status pekerja formal kandas di persimpangan jalan regulasi. Pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sekretariat Negara menegaskan pengemudi super app, seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga inDrive, resmi berstatus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah bakal mengukuhkan keputusan ini dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang ditargetkan tuntas sebelum 17 Agustus 2026. Penetapan status pengusaha mikro ini menghadirkan situasi bagai makan buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah menyodorkan umpan berupa fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga Rp100 juta dan pembebasan pajak omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Namun di sudut lain, label "pengusaha" ini secara otomatis menghapus hubungan kerja formal (employment relationship). Langkah ini berdampak gugurnya kewajiban hukum perusahaan aplikasi untuk memberikan hak-hak normatif buruh. Mulai dari Tunjangan Hari Raya (THR), kepastian Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga proteksi jaminan sosial yang saat ini baru melindungi 351 ribu atau 12 persen pengemudi. BACA HAL 11...

PEKERJA

PENGUNTA OJEK ATAU TAKSI DARING:

59,5%	< Rp 1,5 juta
31,0%	Rp 1,5 juta - Rp 2,5 juta
6,5%	Rp 2,5 juta - Rp 3,5 juta
3,0%	> Rp 3,5 juta

Profesi utama

75,3%

Profesi sampingan:

24,7%



UMKM

PENGEMUDI OJEK ATAU TAKSI DARING:

65,0%	< Rp 1,5 juta
29,0%	Rp 1,5 juta - Rp 2,5 juta
3,3%	Rp 2,5 juta - Rp 3,5 juta
2,8%	> Rp 3,5 juta

RATA RATA PENDAPATAN KOTOR SEHARI

48,8%	> Rp75.000 - Rp100.000
18,9%	> Rp100.000 - Rp125.000
15,6%	> Rp125.000 - Rp150.000
11,4%	> Rp150.000 - Rp200.000
5,3%	> Rp200.000

BIAYA OPERASIONAL BENSIN DAN MAKAN SEHARI

Rp25.000 - Rp50.000	61%
> Rp50.000 - Rp75.000	28,8%
> Rp75.000 - Rp100.000	6,8%
> Rp100.000 - Rp125.000	2,5%
> Rp125.000	0,9%

BALIK NAMA TANAH MAKSIMAL 10 HARI (MULAI 17 AGUSTUS 2026)

Kementerian ATR/BPN mulai menguji coba layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari.

- Mulai Uji Coba: 17 Agustus 2026
- Lokasi: Tahap awal diterapkan di 15 Kantor Pertanahan
- Target Penyelesaian: Maksimal 10 hari

Rincian Proses (Total 10 Hari):

- 3 Hari: Validasi BPHTB
- 2 Hari: Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)
- 5 Hari: Proses penyelesaian di Kantor Pertanahan

Perbandingan Estimasi

Waktu Proses Balik Nama:

SOP Standar Resmi BPN

- Estimasi Waktu: 5 hari kerja
- Keterangan: Dihitung sejak diterimanya bukti pembayaran SPS/PNBP di loket BPN.

Praktik Lapangan (Dulu)

- Estimasi Waktu: 14 hari - 1 bulan
- Keterangan: Bergantung pada tingkat kepadatan antrean dan validasi data di masing-masing daerah.

Aturan Baru (Uji Coba)

- Estimasi Waktu: Maksimal 10 hari
- Keterangan: Rincian target baru secara keseluruhan (termasuk validasi BPHTB 3 hari, AJB 2 hari, dan proses di BPN 5 hari) yang mulai diuji coba secara bertahap.



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan percepatan itu menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kepastian waktu bagi masyarakat.

"Mulai tanggal 17 Agustus 2026, sebagai bentuk kado Indonesia merdeka, kami akan me-launching pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah, yang semula belum terukur kapan selesainya, akan kami launching bahwa pelayanan peralihan hak maksimal 10 hari," ujar Nusron di

BALIK NAMA TANAH DITARGETKAN MAKSIMAL 10 HARI MULAI 17 AGUSTUS

Pemerintah menargetkan proses peralihan hak atau balik nama tanah dapat selesai maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan tersebut akan diterapkan di 17 kabupaten/kota. Pada 24 Agustus, pemerintah akan memperluasnya ke 24 kabupaten/kota tambahan.



Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid

Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Tahap awal kebijakan tersebut akan diterapkan di 17 kabupaten/kota mulai 17 Agustus 2026. Pada 24 Agustus, pemerintah akan memperluasnya ke 24 kabupaten/kota tambahan.

Dengan demikian, hingga akhir Agustus terdapat 41 kabupaten/kota yang masuk dalam tahap awal penerapan layanan balik nama dengan standar waktu maksimal 10 hari.

"Sehingga di bulan ini ada 41 kabupaten/kota," kata Nusron.

Pemilihan wilayah tersebut berkaitan dengan tingginya konsentrasi pelayanan pertanahan di sejumlah daerah. Nusron mengatakan distribusi frekuensi layanan pertanahan tidak merata secara nasional.

"Karena pelayanan di bidang pertanahan itu ternyata frekuensinya tidak merata. Jadi kalau saya hitung secara Pareto, 70 persen itu hanya numpuk di 76 Kabupaten/Kota," ujar Nusron.

Atas dasar itu, pemerintah menargetkan cakupan 76 kabupaten/kota tersebut dapat diselesaikan dalam tiga bulan.

Proses BPHTB Dipercepat

Target balik nama maksimal 10 hari tidak hanya mengandalkan percepatan kerja internal ATR/BPN. Salah satu mata rantai yang selama ini dapat memengaruhi lamanya proses adalah pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan

tersebut, Nusron bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai percepatan, validasi, verifikasi, dan pembayaran BPHTB.

Tito mengatakan SEB tersebut dibuat untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan kantor pertanahan.

"Inti paling utama itu adalah ada koordinasi antara pemda dengan ATR/BPN yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Tito, persoalan pelayanan pertanahan selama ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga integrasi data dan kapasitas sumber daya manusia yang belum merata.

Kondisi tersebut dapat berimbas pada pelayanan BPHTB. Ketika proses BPHTB lambat, pengurusan sertifikat tanah masyarakat ikut tertunda.

"Lambatnya proses penerbitan BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat karena nanti akan lama juga pengurusan sertifikatnya," ujar Tito.

Melalui SEB, bupati dan wali kota diminta menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk berkoordinasi dengan kantor pertanahan di wilayah masing-masing.

Kerja sama itu mencakup integrasi data pertanahan dan perpajakan, termasuk sinkronisasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIP).

Nusron mengatakan pemerintah

ingin menghilangkan ruang ketidakpastian dalam proses tersebut.

"Sehingga, tidak ada lagi potensi-potensi uang tikus maupun uang kosong," kata Nusron dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang disiarkan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam skema baru tersebut, proses pembayaran dan verifikasi BPHTB ditargetkan maksimal tiga hari.

Angka itu jauh lebih singkat dibandingkan waktu yang menurut Nusron selama ini dapat mencapai 20 hingga 40 hari.

Pemerintah bahkan menyiapkan pendekatan fiktif positif. Artinya, jika dalam waktu tiga hari tidak ada verifikasi dari petugas dinas pendapatan daerah, permohonan dianggap telah disetujui.

"Dalam Surat Edaran Bersama nanti ini, kami akan menggunakan prinsip pendekatan yang disebut dengan fiktif positif. Seandainya selama 3 hari ini tidak diverifikasi oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah, maka otomatis dinyatakan disetujui," ujar Nusron.

Setelah BPHTB selesai, proses berlanjut ke pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Tahap tersebut ditargetkan maksimal dua hari.

Berikutnya, dokumen masuk ke proses internal ATR/BPN. Tahap ini ditargetkan selesai maksimal lima hari.

Dengan pembagian waktu tersebut, pemerintah menghitung keseluruhan proses peralihan hak dapat dituntaskan dalam waktu maksimal 10 hari.

"Dua milestone ini memberikan kepastian dasar tentang pertanahan. Kalau ini sudah dilaksanakan, maka di internal ATR/BPN sudah melaksanakan 4 hal transformasi di bidang 7 layanan prioritas," kata Nusron.

Transformasi pelayanan pertanahan tidak berhenti pada balik nama. ATR/BPN juga memperkenalkan layanan pengukuran tanah secara terjadwal. Per 3 Agustus 2026, layanan Pengukuran Terjadwal disebut telah diterapkan di sekitar 400 kantor pertanahan di Indonesia.

Nusron mengatakan sistem tersebut dibuat agar pemohon mengetahui kapan petugas akan datang mengukur bidang tanahnya. (wid,rls,ant/dya)

PRABOWO SERAHKAN SURPRES KE DPR: DESTRY JADI CALON TUNGGAL GUBERNUR BI

DPR Jadi Penentu Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memproses calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Dari sejumlah nama yang sebelumnya mencuat, pemerintah hanya mengajukan satu nama yaitu Destry Damayanti.

Surpres tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR pada Senin (10/8/2026). Dengan pengajuan itu, keputusan akhir mengenai pencalonan Destry kini berada di tangan DPR melalui mekanisme yang berlaku, termasuk proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

"Kami mengirimkan beberapa surpres ke DPR, tadi kami sudah berkomunikasi dengan DPR dengan Ibu Puan dan Pak Dasco yang sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah mengenai calon Gubernur Bank Indonesia disertai dengan calon Deputy Gubernur Senior," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen RI.

Prasetyo memastikan pemerintah hanya mengirim satu nama untuk posisi Gubernur BI.

"Namanya tunggal adalah satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang dia menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara," ujarnya.

Selain calon Gubernur BI, pemerintah mengirimkan nama calon pengganti Deputy Gubernur Senior BI serta calon pengganti Deputy Gubernur BI karena jumlah pejabat tersebut berkurang satu.

Pemerintah juga menyerahkan Surpres mengenai calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan calon duta besar untuk sejumlah negara sahabat.

Seluruh nama tersebut selanjutnya diproses DPR sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk calon Gubernur BI, tahapan DPR menjadi penting karena lembaga legislatif akan menguji kelayakan calon sebelum memberikan persetujuan.

Pencalonan Destry bukan keputusan yang datang tanpa rekam jejak. Ia merupakan Deputy Gubernur Senior BI dan saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI.

Pengalaman tersebut membuat Destry sudah berada di dalam struktur pengambilan kebijakan bank sentral sebelum diajukan sebagai calon gubernur definitif.

Destry pertama kali menjadi Deputy Gubernur Senior BI pada 2019. Ia dilantik berdasarkan Keputusan



Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan pernyataan resmi di hadapan media, didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Deputy Gubernur BI Ricky P. Gozali di Gedung Bank Indonesia. (dok)

Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 pada 7 Agustus 2019. Pada 2024, DPR kembali menyetujui Destry untuk melanjutkan masa jabatan sebagai Deputy Gubernur Senior BI periode 2024-2029.

Sebelum masuk BI, Destry memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan. Ia pernah menjadi ekonom di Citibank, penasihat ekonomi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Kepala Ekonom Bank Mandiri, hingga anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2019.

Destry juga pernah memimpin Task Force Ketahanan Ekonomi di Kementerian BUMN. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, Amerika Serikat.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut Destry sebagai kandidat yang paling aman bagi Prabowo.

"Destry merupakan pilihan yang paling aman bagi Presiden Prabowo. Selain mempunyai pengalaman di BI, LPS, Bank Mandiri, dan sebelumnya adalah Deputy Senior Gubernur BI, ia merupakan kandidat yang bisa diterima pasar dan mempunyai fleksibilitas untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait berbagai kebijakan ekonomi," kata Wijayanto.

Namun, pengalaman panjang di lingkungan pemerintah dan sektor keuangan tersebut sekaligus

membawa tantangan: bagaimana memastikan koordinasi dengan pemerintah tidak mengurangi independensi bank sentral.

Menguji Independensi

Bagi Destry, persoalan terbesar setelah pencalonan bukan semata kemampuan teknokratis. Tantangannya adalah menjaga BI tetap independen ketika pemerintah membutuhkan dukungan kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Wijayanto menilai independensi BI harus tetap menjadi perhatian. Kondisi fiskal, daya saing ekonomi, neraca pembayaran, dan nilai tukar rupiah menjadi sejumlah persoalan yang akan dihadapi gubernur BI berikutnya.

Dinamika global dan potensi politisasi bank sentral juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom BCA David Sumual. Ia menilai Destry memiliki kredibilitas di mata pelaku pasar karena pernah berkiprah di BI, perbankan, dan pasar modal.

"Ya, saya pikir beliau sudah berpengalaman juga di Bank Indonesia ya. Dan di mata pasar ya cukup kredibel, di mata pasar kredibel lah ya, di pasar keuangan sudah pernah di perbankan juga, pernah di pasar modal juga kan ya, jadi mengerti betul kondisi di pasar keuangan," kata David.

Namun, David mengingatkan bahwa kebijakan moneter BI tidak bisa dilepaskan dari tekanan eksternal. Geopolitik dan kondisi perekonomian

global masih bergerak volatil.

"Ya tetap kondisi moneter ini kan sebenarnya juga tidak terlepas dari kondisi eksternal ya, nah eksternalnya ini kan kita lihat kan masih cukup volatile, kondisi geopolitik tensinya masih cukup tinggi," ujarnya.

Ancaman lain datang dari dalam negeri. David memperkirakan kemungkinan El Nino dapat memberikan tekanan terhadap harga pangan sehingga BI perlu menjaga inflasi tetap terkendali.

"Terus juga inflasi dalam negeri juga jadi tantangan apalagi kita mau kabarnya dan juga kita ada kemungkinan mengalami El Nino gitu kan, jadi bagaimana menjaga supaya inflasi itu tetap manageable tetap rendah," katanya.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pengalaman Destry sebagai Deputy Gubernur Senior sejak 2019 serta sebagai pejabat sementara Gubernur BI dapat membuat transisi berlangsung relatif mulus.

Pasar, menurut Yusuf, cenderung tidak melihat adanya perubahan mendadak dalam arah kebijakan BI, terutama terkait stabilitas rupiah dan inflasi. Namun, status Destry sebagai calon tunggal juga memiliki konsekuensi.

Kepastian kandidat memang dapat mengurangi spekulasi pasar mengenai siapa yang akan memimpin BI. Di sisi lain, DPR memiliki ruang yang lebih terbatas untuk membandingkan alternatif figur karena pemerintah hanya mengirim satu nama.

Respons awal pasar terhadap pencalonan Destry terlihat dari pergerakan rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg sekitar pukul 14.59 WIB, rupiah berada di level Rp17.755 per dolar AS. Posisi tersebut menguat 142 poin atau 0,79 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi menilai penguatan tersebut menunjukkan pasar menerima keputusan pemerintah mengajukan Destry.

"Artinya apa? Bahwa pasar menerima dengan dipilihnya Ibu Destry sebagai calon gubernur Bank Indonesia," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, penguatan rupiah tidak hanya dipengaruhi pencalonan Destry. Kondisi ekonomi domestik turut menjadi sentimen positif. (wid,rls,ktn/dya)

GURU DIMINTA MAKAN MBG BERSAMA SISWA, BGN: JADI LAPISAN TERAKHIR KEAMANAN MAKANAN

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta guru ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama siswa di kelas. Permintaan itu bukan sekadar untuk menemani peserta didik makan, melainkan bagian dari upaya menjadikan program MBG sebagai sarana edukasi sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan di sekolah.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta jajaran BGN pusat dan daerah yang membahas pelaksanaan program MBG di sekolah.

Menurut Sudaryono, guru selama ini sudah mendampingi siswa dalam berbagai tahapan pembagian MBG. Mereka membantu siswa mengantre, mengambil makanan, mencuci tangan hingga berdoa sebelum makan.

Namun, BGN ingin keterlibatan itu diperluas. Guru diminta makan bersama siswa agar dapat memberikan contoh langsung mengenai kebiasaan makan yang baik.

"Namun sekali lagi saya ingin dan menginginkan dan memohon dengan kesediaannya kepada bapak-ibu guru, untuk menu MBG-nya dimakan bersama-sama dengan siswa. Tujuannya tadi disampaikan oleh Bapak Menteri (Abdul Mu'ti) adalah untuk supaya sebagai ajang edukasi, menjadi tempat untuk mengedukasi siswa tadi. Apakah cuci tangan, berdoa dan proses tata krama ini," ujar Sudaryono, dikutip dari unggahan Instagram resminya, Senin (10/8/2026).

Selain menjadi bagian dari proses pendidikan, Sudaryono meminta guru ikut memastikan makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi layak konsumsi.

Ia menyebut guru dapat berperan sebagai pemeriksa terakhir secara organoleptik. Pemeriksaan organoleptik dilakukan dengan mengandalkan indera untuk melihat kondisi makanan, mencium aroma, hingga mencicipinya.

"Selain itu juga di situ bapak-ibu guru sebagai perannya kami mohon sebagai organoleptik yang terakhir. Manakala (makanan MBG) tidak layak, itu kemudian wajib hukumnya tidak dibagikan," ujar Sudaryono.

Dalam penjelasan lainnya, BGN menyebut pemeriksaan keamanan makanan sebenarnya dilakukan melalui beberapa lapisan sebelum makanan dikonsumsi siswa.

Di sekolah, BGN menyiapkan person in charge (PIC) dari unsur tenaga kependidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha. Dua orang PIC bertugas menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kemudian melakukan pemeriksaan sebelum makanan dibagikan kepada peserta didik.



Kepala BGN Sudaryono

Sudaryono mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi lapisan terakhir untuk memastikan menu MBG memenuhi standar keamanan.

"Manakala tidak memenuhi standar, maka tidak harus atau wajib hukumnya tidak diberikan kepada siswa. Jadi PIC itu adalah layer terakhir kedua, yang memastikan bahwa menu makanan itu aman dan tidaknya," ujar Sudaryono. Pengawasan juga akan diperketat melalui aturan mengenai waktu konsumsi makanan.

BGN akan mulai menerapkan aturan baru pada pekan berikutnya. Setiap ompreng MBG akan diberi tanda atau peringatan mengenai batas waktu makanan tersebut harus dikonsumsi.

Sudaryono meminta guru maupun siswa tidak mengonsumsi makanan yang sudah melewati batas waktu sebagaimana tercantum pada ompreng.

"Kemudian juga harus, kemudian kalau memang jamnya di dalam ompreng itu sudah melebihi jam yang tertera di dalam omprengnya, kami minta bapak-ibu guru tidak boleh mengonsumsi dan apalagi peserta didiknya atau anak didiknya, siswanya juga tidak boleh mengonsumsi manakala sudah melewati batas dari jam yang ditentukan," ujar Sudaryono.

Aturan tersebut menambah tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan MBG. Namun, Sudaryono memandang tambahan tugas itu tetap berkaitan dengan fungsi pendidikan dan perlindungan siswa.

Siswa Diminta Tak Bawa Pulang MBG

Persoalan lain yang menjadi perhatian BGN adalah kebiasaan sebagian siswa membawa pulang makanan MBG.

Sudaryono memahami alasan di balik kebiasaan tersebut. Menurut dia, bagi sebagian siswa di daerah pelosok, telur, ayam, dan ikan bukan makanan yang selalu tersedia dalam menu sehari-hari.

"Banyak di antara peserta didik kita ini ternyata hatinya baik. Saya sendiri berasal dari satu desa, saya paham sekali itu bahwa telur, ayam, ikan ini adalah barang yang bagi sebagian orang khusus yang di pelosok ini adalah barang yang jarang dia makan sehari-hari," ujar Sudaryono.

Karena itu, ada siswa yang menyisihkan sebagian makanan untuk keluarganya di rumah. Makanan kemudian dibungkus dan dibawa pulang.

Namun, BGN meminta kebiasaan tersebut dihentikan. Alasannya berkaitan dengan keamanan pangan dan batas waktu konsumsi.

"Kemudian dia bungkus, dia bawa pulang. Jadi kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis bapak-ibu (guru) semua, itu sebaiknya tidak dibawa pulang," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, makanan MBG yang dibawa pulang berpotensi mengalami penurunan kualitas karena tidak lagi dikonsumsi dalam rentang waktu yang ditentukan.

Ia bahkan mengaitkan kebiasaan tersebut dengan sejumlah kasus keracunan. Dalam beberapa kasus yang disampaikan Sudaryono, bukan siswa penerima MBG yang mengalami keracunan, melainkan anggota

keluarganya setelah mengonsumsi makanan yang dibawa pulang.

"Ini menjadi satu keseracunan di beberapa titik bapak-ibu guru adalah itu. Bahkan yang keracunan bukannya siswanya, tapi bapak-ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi. Sekali lagi, keamanan itu menjadi yang paling utama dulu," ujar Sudaryono.

Atas alasan tersebut, sekolah diminta mencatat siswa yang membawa pulang makanan MBG dan memberikan informasi kepada orang tua mengenai risiko mengonsumsi makanan yang telah melewati batas waktu..(wid,ist/dya)

KELOMPOK PENERIMA PROGRAM MBG

Siswa
48,3 juta orang

Balita
6,3 juta orang

Ibu menyusui
2,1 juta orang

Ibu hamil
868,2 ribu orang

Santri
644,7 ribu orang

Guru/tenaga pendidik
4,2 juta orang



Babak Baru Kematian Sutrimo, Eks Karumga Febrie Adriansyah **MAKAM SEGERA DIBONGKAR, MUNCUL NAMA FEBRIO**

Penyidik Polda Metro Jaya menyiapkan ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang disebut pernah menjadi kepala rumah tangga di kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Bersamaan dengan rencana pembongkaran makam, polisi juga mendalami sosok Febrio Adiono, pegawai Kejaksaan Agung yang disebut berada dalam rangkaian peristiwa setelah Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri.



Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Sutrimo di depan klinik kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026). ANTARA

Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, pria yang disebut-sebut pernah bekerja dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yang tewas secara tiba-tiba kini memasuki babak serius.

Polda Metro Jaya resmi meningkatkan perkara kematian Sutrimo dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Tak hanya mencari penyebab kematian, polisi kini membuka kemungkinan adanya tindak pidana pembunuhan hingga pembunuhan berencana.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk menindaklanjuti informasi dari Polresta Banyumas.

"Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh

Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan," kata Iman di Markas Polda Metro Jaya, Senin (10/8/2026).

Peningkatan status ini membuat penyidik kini dapat melakukan pendalaman lebih jauh terhadap dugaan tindak pidana di balik kematian Sutrimo.

Iman menyebut dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana menjadi bagian yang tengah didalami penyidik berdasarkan laporan polisi yang diterima.

"Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan atau pun pembunuhan berencana," ucap dia.

Ekshumasi dilakukan setelah keluarga Sutrimo melaporkan kematian tersebut ke Polresta Banyumas pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026. Laporan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik

untuk kembali menelusuri penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih menjadi pertanyaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penyidik sedang mempersiapkan ekshumasi.

"Iya betul dan sedang dipersiapkan," kata Budi saat dikonfirmasi,

Minggu (9/8/2026).

Ekshumasi akan dilakukan terhadap makam Sutrimo di Banyumas. Pemeriksaan jenazah diperlukan untuk membantu penyidik memastikan penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan forensik.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 Juli 2026. Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Sutrimo dinyatakan meninggal dan jenazahnya kemudian dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan.

Selain menyiapkan ekshumasi, polisi menelusuri sosok Febrio Adiono. Namanya muncul setelah disebut sebagai salah satu pihak yang mengantar Sutrimo dari Klinik Mordent menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.

Budi mengatakan polisi belum memastikan keterlibatan Febrio dalam peristiwa tersebut. Identitas dan perannya masih harus diverifikasi.

"Nah, ini nanti akan didalami (benar atau tidaknya Febrio pegawai Kejaksaan)," kata Budi.

Kejaksaan Agung membenarkan bahwa Febrio merupakan pegawai Kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Anang Supriatna mengatakan Febrio bukan jaksa, melainkan pegawai administrasi.

"Yang namanya Saudara Febrio, yang kami tahu memang dia pegawai Kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai Kejaksaan," ujar Anang.

Anang juga membenarkan bahwa Febrio pernah menjadi staf Febrie Adriansyah.

"Stafnya (Febrie) ya. Iya (Stafnya Febrie)."

Menurut Anang, setelah Febrie diberhentikan sementara karena terseret perkara korupsi tindak pidana pencucian uang, Febrio kini bertugas sebagai staf administrasi biasa.

"(Saat ini) staf biasa. Enggak (mendampingi pejabat Kejaksaan lainnya)," tuturnya.

Namun, Kejagung belum mengetahui apakah Febrio benar merupakan orang yang mengantar Sutrimo ke rumah sakit. Informasi tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan polisi. (iwt,kum,rla/dya)



Keluarga Sutrimo didampingi kuasa hukum membuat laporan ke Polresta Banyumas.ist

Lahan PSEL Malang Raya Terus Ditolak Warga, Ada Apa?



Bupati Malang, Sanusi. (Santi/Lentera)

MALANG — Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk aglomerasi Malang Raya masih terbentur persoalan paling mendasar yaitu ketersediaan lahan. Pemerintah Kabupaten Malang hingga kini belum menetapkan lokasi pembangunan. Sementara sejumlah lahan yang sempat diusulkan justru

mendapat penolakan dari masyarakat.

Bupati Malang Sanusi mengakui pencarian lahan belum menghasilkan keputusan. Penolakan warga menjadi salah satu kendala utama pemerintah daerah.

"Belum (ada lahan yang ditetapkan). Karena memang masih banyak penolakan dari masyarakat," ujar Sanusi, Senin (10/8/2026).

Lokasi terakhir yang diajukan Pemkab Malang berada di salah satu desa di Kecamatan Pakisaji. Namun, rencana itu kembali menghadapi keberatan warga yang khawatir terhadap dampak lingkungan.

"Terakhir kemarin itu di Pakisaji, di salah satu desa di sana. Itu juga masih banyak yang keberatan. Karena

memang masyarakat setempat khawatir akan terjadi pencemaran terhadap lingkungannya," kata Sanusi.

Persoalan tersebut membuat rencana membangun PSEL di Malang Raya belum bergerak ke tahap penetapan lokasi. Padahal, Kabupaten Malang masih ditunjuk pemerintah pusat untuk menyediakan lahan bagi fasilitas yang akan melayani kawasan aglomerasi Malang Raya.

Sanusi mengatakan proyek tersebut tidak berdiri sendiri. Pembangunan PSEL merupakan bagian dari kesepakatan tiga daerah di Malang Raya dan berkaitan dengan ketentuan timbunan sampah yang menjadi dasar pembangunan fasilitas tersebut.

"Ini juga sudah kesepakatan tiga daerah Malang Raya," ujarnya.

Namun, kesepakatan antarpemerintah daerah belum otomatis menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat. Pemkab Malang harus menemukan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis

sekali dapat diterima warga.

Kecamatan Pakisaji bukan satu-satunya wilayah yang ber-masalah. Sebelumnya, Pemkab Malang sempat mengusulkan lahan di Kecamatan Pakis.

Rencana itu tidak direkomendasikan karena lokasi berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang berkaitan dengan area penerbangan Lanud Abdulrachman Saleh.

Di sisi lain, beberapa desa di Bululawang juga sempat diajukan. Hasilnya serupa, muncul penolakan dari masyarakat.

"Ada beberapa desa di Bululawang itu kami ajukan, ada penolakan dari warga, begitu juga di Pakisaji," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang Ahmad Dzulfikar Nurrahman.

Dengan demikian, persoalan lokasi bukan sekadar mencari tanah kosong. Lahan tersebut harus memenuhi serangkaian persyaratan yang cukup ketat. (santi/dya)

DPRD Kota Malang Khawatirkan APBD terkait Feeder Trans Jatim

MALANG - DPRD Kota Malang mengkhawatirkan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keberlanjutan feeder Trans Jatim di Malang Raya. Sebab, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk operasional hanya bersifat stimulan dan tidak diberikan secara permanen.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan Pemkot Malang perlu sejak awal memetakan kebutuhan dalam pengoperasian feeder Trans Jatim. Mulai dari alur layanan, kebutuhan tenaga, hingga besaran anggaran yang nantinya menjadi tanggung jawab Pemkot Malang.

"Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota Malang itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Saya sudah dari awal sampaikan segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower yang dibutuhkan seperti apa," ujar Amithya, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, bantuan hingga Rp5 miliar tersebut merupakan stimulan

atau pancingan agar program transportasi publik dapat mulai berjalan. Karena itu, kebutuhan pembiayaan setelah skema bantuan tersebut berakhir perlu sudah dipetakan sejak awal.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini menilai, keberadaan feeder menjadi bagian penting agar layanan Trans Jatim yang telah berjalan tidak hanya menjangkau jalan-jalan protokol. Dalam skema tersebut, angkot yang sudah beroperasi di Kota Malang dapat diberdayakan sebagai transportasi pengumpan.

Menurut Mia, angkot existing dapat digunakan untuk melengkapi layanan Trans Jatim. Bus Trans Jatim melayani jalur utama, sedangkan angkot dapat mengisi konektivitas menuju ruas-ruas jalan yang tidak dilalui layanan tersebut.

"Misalkan di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di cabang-cabang jalannya," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan, agar program tersebut tidak berhenti setelah subsidi dari Pemprov Jatim berakhir.

Menurutnya, keberadaan anggaran daerah menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sejak awal agar layanan transportasi publik dapat berjalan berkelanjutan.

"Jangan sampai kemudian masyarakat Kota Malang yang sudah cukup terfasilitasi dengan Trans Jatim ini, kemudian tidak segera kita lengkapi sarana pendukungnya. Lalu akhirnya menjadi sebuah program yang berjalan ketika ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, selepas itu selesai. Jangan, sayang," tegasnya.

Mia kembali menegaskan, kebutuhan pembiayaan perlu mulai dihitung seiring adanya program transportasi publik yang difasilitasi Pemprov Jatim. "Makanya itu, mestinya sudah terpetakan dari awal untuk di APBD seperti apa. Sudah mulai dihitung. Apa yang harus kita lakukan," terangnya.

Mia menilai skema feeder juga



Ilustrasi: Angkutan kota melintas di Koridor Kayutangan Heritage Kota Malang. (Santi/Lentera)

dapat menjadi momentum untuk mengintegrasikan transportasi publik yang sudah ada di Kota Malang dengan layanan Trans Jatim.

"Ini program bagus. Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program Trans Jatim, terus menggantikan yang kita sudah punya," pungkasnya. (Santi/Dya)

Penembakan Berulang di Thailand

EKS ANGGOTA PARLEMEN TEMBAK PEJABAT, DIPICU UTANG RP5 M

Penembakan kembali terjadi di Provinsi Nonthaburi, Thailand, hanya berselang beberapa hari setelah aksi penembakan di sebuah sekolah yang menewaskan tujuh orang. Kali ini, seorang mantan anggota parlemen menembak pejabat pemerintah daerah yang disebutkan memiliki persoalan utang dengannya. Laporan media Thailand menyebut nilainya sekitar 11 juta baht atau setara lebih dari Rp5 miliar (Rp460 per baht). Polisi masih mengumpulkan bukti terkait klaim mengenai utang tersebut.

Mantan anggota parlemen Thailand, Chalong Riewrang, 71 tahun, ditangkap setelah menembak Thongchai Yenprasert, pejabat senior sekaligus Ketua Organisasi Administrasi Provinsi Nonthaburi (PAO), pada Senin (10/8/2026).

Keterangan awal menyebut penembakan berlangsung di kompleks pemerintahan Provinsi Nonthaburi, di wilayah pinggiran utara Bangkok. Thongchai sempat mendapat perawatan di rumah sakit, tetapi kemudian meninggal akibat luka tembak.

Chalong, yang merupakan mantan politikus ternama di Nonthaburi, mengakui penembakan tersebut setelah ditangkap. Kepada wartawan, ia mengatakan awalnya hendak menemui Thongchai untuk membicarakan persoalan utang.

"Saya mengikuti dia ke mobilnya dan mengetuk kaca mobil sambil mengatakan ingin berbicara. Dia mengatakan tidak mau berbicara, jadi saya mengeluarkan pistol," kata Chalong.

"Saya tidak berniat menembak, tetapi sopirnya mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada saya, jadi saya pun melepaskan tembakan," ujarnya.

Dalam insiden tersebut, sopir Thongchai juga tertembak. Thongchai mengalami luka parah, termasuk luka tembak di bagian leher. Direktur Rumah Sakit Phra Nang Klao, Sakon Sukprom, mengatakan Thongchai kehilangan banyak darah sebelum akhirnya meninggal dunia.

Pengakuan Lewat Live YouTube

Yang membuat kasus ini menjadi perhatian adalah tindakan Chalong setelah penembakan. Alih-alih langsung melarikan diri, ia menghubungi seorang komentator politik Thailand yang sedang melakukan siaran langsung melalui YouTube.

Orang yang dihubungi Chalong adalah Anchalee Paireerak, mantan jurnalis yang tengah memandu program politik. Telepon tersebut masuk ketika siaran sedang berlangsung.

"Saya akan menelepon Anda kembali... Oh, sesuatu yang besar



Petugas kepolisian forensik memeriksa lokasi penembakan setelah mantan anggota parlemen Chalng Riewrang diduga menembak Thongchai Yenprasert, ketua Organisasi Administrasi Provinsi Nonthaburi, di Provinsi Nonthaburi, wilayah pinggiran Bangkok, Thailand, Senin (10/8/2026). (reuters.ist)

terjadi? Silakan, apa itu?" kata Anchalee ketika mengangkat telepon.

Percakapan dari pihak Chalng tidak terdengar jelas oleh penonton. Namun, reaksi Anchalee menunjukkan bahwa ia baru saja menerima pengakuan mengenai penembakan.

"Apakah dia meninggal? Apakah dia meninggal? Anda menembaknya di kepala? Anda harus menunggu di sana sampai polisi datang," kata Anchalee.

"Jangan pergi ke mana pun," ujarnya kepada Chalng.

Chalng kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Media Thailand melaporkan polisi tiba di lokasi setelah mendapat informasi mengenai keberadaannya.

Motif penembakan masih didalami polisi. Namun, Chalng mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya marah karena Thongchai tidak memenuhi permintaannya.

Dalam keterangannya, Chalng menyebut dirinya dan Thongchai sudah lama saling mengenal. Ia mengaku awalnya ingin menagih uang yang menurutnya menjadi haknya.

Laporan media Thailand menyebut angka yang dipersoalkan mencapai 11 juta baht. Namun, klaim mengenai hubungan utang tersebut masih merupakan keterangan dari pihak Chalng dan menjadi bagian dari penyelidikan polisi.

Chalng bukan orang yang asing

dalam politik Thailand. Pria berusia 71 tahun itu pernah menjadi anggota parlemen yang mewakili Provinsi Nonthaburi selama tiga periode. Pada periode terakhirnya, ia tercatat berada di bawah Partai Pheu Thai.

Ia juga mendapat julukan "kobra", istilah yang diberikan kepada politikus yang dikenal berani mengambil sikap berbeda dari garis partainya.

Julukan tersebut dikaitkan dengan keputusan Chalng pada 1997 ketika ia memilih kandidat perdana menteri dari partai lain.

Dalam pemilihan terakhir, Chalng kembali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen melalui Partai Bhumjaitai, tetapi gagal memperoleh kursi.

Sementara itu, korban, Thongchai

Yenprasert, juga memiliki latar belakang di pemerintahan dan kepolisian.

Thongchai merupakan mantan polisi yang kemudian menjadi pimpinan Organisasi Administrasi Provinsi Nonthaburi. Ia bergabung dengan kepolisian pada 1984 dan pernah menjadi wakil kepala serta kepala sejumlah kantor polisi distrik di Nonthaburi.

Ia kemudian diangkat menjadi pimpinan badan pemerintah provinsi tersebut pada 2004.

Penembakan terhadap pejabat Nonthaburi terjadi hanya tiga hari setelah penembakan massal di sebuah sekolah di provinsi yang sama.

Pada Jumat (7/8), seorang pelajar berusia 14 tahun melakukan aksi penembakan yang bermula di rumah kakek-neneknya dan berlanjut ke Debsirin Nonthaburi School. Sedikitnya tujuh orang tewas, termasuk pelaku, sementara puluhan lainnya terluka. Reuters melaporkan korban tewas mencakup lima stadiperoleh. Pelaku menggunakan senjata milik kakeknya dan melepaskan sedikitnya 26 peluru.

Pelaku mempelajari cara menggunakan senjata melalui media sosial, kata kepolisian setempat. Konsumsi konten kekerasan di media sosial, kegagalan pelaku terkait studi dan masalah keluarga disebut kepolisian Thailand menjadi pemicu aksi penembakan itu. Remaja tersebut ditengarai juga memiliki konflik dengan teman-teman sebayanya.

Pejabat senior polisi Atthapol Anusit mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa mereka telah memeriksa 17 saksi sejauh ini saat menyelidiki motif remaja berusia 14 tahun tersebut. (gus,rtr,ist/dya)



Istri seorang guru yang tewas ditembak terlihat menangis di Sekolah Debsirin Nonthaburi, setelah terjadi insiden penembakan di pinggiran Bangkok, Thailand, 7 Agustus 2026.

Bukan Sekadar Kimchi, Ini Gaya Hidup Ala Korea Pembentuk Tubuh Ideal

Budaya Korea Selatan (Korsel) bukan hanya populer lewat K-pop dan drama Korea. Pola makan, kebiasaan bergerak, hingga tren olahraga masyarakatnya juga ikut menjadi perhatian dunia.

Salah satu yang kerap membuat penasaran adalah citra tubuh ramping yang banyak terlihat pada selebritas Korea. Dari adegan makan dalam drama Korea hingga konten gaya hidup di media sosial, masyarakat Korea sering digambarkan memiliki pola makan yang sehat, aktif bergerak, dan mampu menjaga berat badan.

Jawabannya jauh lebih kompleks.

Berat badan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, genetik, kondisi sosial hingga kebiasaan hidup. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

sendiri menegaskan bahwa obesitas merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku makan, akses terhadap makanan sehat, lingkungan dan perubahan gaya hidup.

Karena itu, ada sejumlah kebiasaan masyarakat Korea yang menarik untuk dipelajari, tetapi tidak tepat jika seluruh penduduk Korea Selatan dianggap memiliki tubuh langsing atau berat badan ideal. Lima faktor yang sering dikaitkan dengan pola hidup sehat masyarakat Korea.

Banyak Sayuran dan Banchan

Salah satu ciri khas makanan Korea adalah keberadaan banchan, yakni berbagai lauk pendamping yang disajikan bersama makanan utama.

Kimchi, sayuran berbumbu, tauge, rumput laut, mentimun, atau berbagai jenis sayuran lainnya kerap hadir dalam satu meja makan. Pola seperti ini membuat konsumsi sayuran menjadi bagian dari struktur makanan sehari-hari, bukan sekadar tambahan sesekali.

Penelitian yang diterbitkan di BMJ Open menganalisis 115.726 orang dewasa Korea berusia 40-69 tahun. Studi tersebut menemukan adanya hubungan antara konsumsi kimchi dalam jumlah moderat dan prevalensi obesitas yang lebih rendah pada kelompok tertentu. Pada pria, konsumsi total kimchi satu hingga tiga porsi per hari dikaitkan dengan prevalensi obesitas yang lebih rendah dibandingkan konsumsi kurang dari satu porsi.

Namun, penelitian yang sama memberikan catatan penting jika kimchi bukan makanan ajaib untuk

menurunkan berat badan.

Kimchi juga merupakan salah satu sumber natrium dalam pola makan Korea. Berdasarkan data Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2019-2020 yang dikutip dalam penelitian tersebut, konsumsi kimchi menyumbang sekitar 500,1 miligram natrium per hari atau sekitar 15,1 persen dari total asupan natrium orang dewasa.

Bukan Sumpitnya, tapi Mengatur Porsi

Menggunakan sumpit sering disebut sebagai salah satu rahasia tubuh langsing masyarakat Korea karena makanan yang diambil dalam satu waktu relatif sedikit. Namun, tidak ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa sumpit secara otomatis membuat seseorang makan lebih sedikit dan menjadi langsing.

Yang lebih penting adalah porsi, kecepatan makan, komposisi makanan

dan kesadaran terhadap rasa kenyang.

Pola makan tradisional Korea sendiri memiliki berbagai komponen makanan dalam satu meja, sehingga seseorang tidak hanya mengandalkan satu makanan utama. Lauk sayuran, sumber protein, nasi, sup dan makanan fermentasi dapat hadir secara bersamaan.

Penelitian terhadap pola makan masyarakat Korea juga menunjukkan bahwa tidak semua pola makan tradisional otomatis berkaitan dengan berat badan yang lebih rendah.

Kebiasaan Pakai Transportasi Umum

Kebiasaan menggunakan transportasi umum juga sering disebut sebagai salah satu faktor yang membuat masyarakat perkotaan Korea lebih aktif bergerak.

Di kota besar seperti Seoul, perjalanan menggunakan kereta bawah tanah dan bus sering melibatkan aktivitas berjalan kaki dari rumah menuju stasiun, berpindah jalur, atau berjalan dari stasiun menuju tempat tujuan. Dengan kata lain, aktivitas fisik tidak selalu harus berupa satu jam olahraga di pusat kebugaran.

Tren Olahraga

Pilates, gym, tenis, golf hingga berbagai kelas kebugaran menjadi bagian dari tren wellness di Korea Selatan.

Media sosial dan industri hiburan ikut membuat olahraga terlihat sebagai bagian dari gaya hidup.

Selebritas dan influencer kerap membagikan rutinitas latihan mereka, sehingga aktivitas fisik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kesehatan, tetapi juga sebagai aktivitas sosial dan gaya hidup.

Namun, ada perbedaan antara olahraga untuk kesehatan dan olahraga semata-mata untuk mengejar bentuk tubuh tertentu.

(far,ist/dya)

JANGAN SALAH KAPRAH SOAL KIMCHI

Plus (Manfaat Kimchi)

1. Menjaga Berat Badan: Studi menunjukkan konsumsi rutin membantu menurunkan lemak tubuh dan menjaga berat badan ideal.
2. Kesehatan Pencernaan: Kaya serat dan bakteri baik (fermentasi) yang membantu meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan nyeri perut.

Minus (Hal yang Perlu Diwaspadai)

1. Tinggi Natrium: Proses pengaraman membuat kimchi tinggi garam, yang berpotensi meningkatkan tekanan darah jika berlebihan.
2. Bukan Obat Instan: Efeknya tidak otomatis membuat kurus tanpa didukung pola makan sehat dan olahraga.
3. Picu Ketidaknyamanan: Rasa pedas, asam, dan hasil fermentasinya bisa menimbulkan efek samping pencernaan pada orang tertentu.



Data Center AI Mau Dipindah ke Luar Angkasa, Solusi atau Bencana Baru?

Ketika kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI) terus melonjak, perusahaan teknologi mulai membayangkan pusat data yang tidak lagi berdiri di atas tanah, melainkan mengorbit Bumi.

Gagasannya terdengar seperti fiksi ilmiah yaitu server dan chip AI ditempatkan di satelit, ditenagai Matahari, lalu bekerja mengolah data dari luar atmosfer.

Namun, di balik janji mengatasi kebutuhan energi AI, muncul pertanyaan besar, apakah memindahkan data center ke luar angkasa benar-benar lebih ramah lingkungan, atau justru memindahkan

persoalan dari Bumi ke orbit. Kekhawatiran itu menguat setelah sejumlah ilmuwan, pakar antariksa dan kelompok lingkungan meminta regulator Amerika Serikat melakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum konstelasi data center berukuran sangat besar dibangun.

"Kita tidak boleh mengulangi kesalahan dengan meluncurkan teknologi baru tanpa terlebih dahulu memahami dampaknya terhadap lingkungan," demikian isi seruan para ilmuwan yang dikutip NBC News. Perdebatan ini muncul ketika industri AI membutuhkan

infrastruktur komputasi yang semakin besar. Pusat data di Bumi membutuhkan listrik dalam jumlah besar, sekaligus air untuk sistem pendinginan pada banyak fasilitas.

Laporan U.S. Government Accountability Office (GAO) pada April 2026 menyebut pusat data berbasis ruang angkasa berpotensi mengurangi kebutuhan lahan, listrik dan air yang diperlukan pusat data di Bumi.

Namun, lembaga tersebut juga menyoroti hambatan teknik dan ekonomi yang besar. Salah satunya justru masalah yang terdengar paradoks: ruang angkasa tidak

otomatis menjadi tempat yang mudah untuk mendinginkan komputer.

Mengapa Dibawa ke Orbit?

Salah satu alasan utama adalah energi Matahari. Di luar atmosfer Bumi, satelit dapat memperoleh paparan sinar Matahari dalam kondisi yang lebih konsisten dibandingkan panel surya di permukaan Bumi. Secara teori, hal ini memungkinkan sistem komputasi memperoleh sumber energi surya yang melimpah tanpa harus bergantung langsung pada jaringan listrik di darat. Konsep tersebut juga dapat mengurangi kebutuhan mengirim data mentah dari satelit ke Bumi untuk diproses. Data bisa dianalisis langsung di orbit dan hanya hasil yang diperlukan yang dikirim kembali.

Namun, ada perbedaan antara memproses data satelit di orbit dan membangun pusat data raksasa untuk menjalankan model AI generatif. Yang kedua jauh lebih menantang.

SpaceX dan Ambisinya

Salah satu perusahaan yang paling agresif mengembangkan gagasan ini adalah SpaceX. Rencana tersebut berkaitan erat dengan ekspansi Starlink dan ambisi membangun infrastruktur komputasi berbasis ruang angkasa. Laporan terbaru menunjukkan Elon Musk menargetkan data center di luar angkasa mulai diluncurkan pada 2027. Ambisi tersebut menjadi bagian dari visi SpaceX untuk mengembangkan ekosistem yang menggabungkan peluncuran roket, jaringan satelit dan komputasi AI. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Bedah Makeup 4 Member No Na di MV 'Honk!'

Girl group No Na kembali mencuri perhatian lewat single terbaru mereka, 'Honk!'. Tak hanya musik dan visual video musiknya yang tampil penuh warna, riasan keempat member juga menjadi bagian penting dari konsep penampilan mereka.

Berbeda dari kesan pada video musik sebelumnya, No Na menghadirkan gaya yang lebih playful dengan sentuhan Y2K makeup yang kembali populer di kalangan Gen Z. Meski berada dalam satu konsep visual, masing-masing member memiliki karakter riasan yang berbeda.

Mulai dari soft glam, smokey eyes bernuansa biru, kombinasi lavender hingga cool fresh makeup, empat member No Na menampilkan interpretasi berbeda terhadap tren makeup era 1990-an hingga awal 2000-an.

Christy: Soft Glam dengan Sentuhan Lilac

Christy tampil dengan riasan yang relatif lembut dibandingkan member lainnya. Karakter makeup-nya mengarah pada soft glam dengan mata sebagai titik perhatian utama.

Eyeshadow lilac digunakan pada kelopak mata dan bagian aegyo-sal. Sentuhan glitter dan shimmer membuat area mata tampak lebih bercahaya, terutama ketika terkena pencahayaan dalam video musik.

Eyelineer dibuat sedikit lebih tebal untuk memberikan ilusi mata yang lebih besar. Tampilan tersebut kemudian dilengkapi bulu mata palsu yang lentik sehingga mata terlihat

lebih bervolume. Untuk complexion, Christy menggunakan base dengan hasil semi-matte yang tampak halus dan flawless. Blush pink lembut ditempatkan di area tulang pipi untuk memberikan kesan segar.

Highlighter pada pipi dan hidung menambahkan efek glowing. Sementara untuk bibir, warna pink dengan hasil glossy membuat tampilan keseluruhan terasa lebih feminin dan youthful.

Perpaduan lilac, pink, shimmer, dan glossy lips membuat penampilan Christy menjadi salah satu interpretasi paling lembut dari konsep Y2K dalam 'Honk!'

Esther: Smokey Eyes Biru Bold

Jika Christy tampil soft, Esther justru membawa karakter yang lebih bold dan mature.

Fokus makeup Esther berada pada bagian mata. Ia menggunakan smokey eyes dengan warna biru tua yang dipadukan eyeshadow hitam untuk menghasilkan tampilan lebih tajam.

Pada bagian kelopak mata, shimmer putih memberikan kontras dengan warna gelap di bagian luar. Eyelineer hitam dibuat memanjang sehingga membentuk efek mata yang lebih tegas.

Bulu mata tetap dibuat relatif natural agar riasan mata tidak terlihat terlalu berat. Sementara alis dipertahankan natural tetapi memiliki bentuk yang cukup tegas.

Complexion Esther menggunakan hasil matte yang halus. Contour pada tulang pipi, rahang, dan dahi memberikan dimensi pada wajah. Blush mauve yang lembut

kemudian dipadukan dengan shading hidung dan highlighter untuk menyeimbangkan riasan mata yang cukup intens.

Sebagai penutup, Esther memilih lipstick merah maroon glossy. Warna tersebut memperkuat kesan elegan sekaligus fierce.

Kombinasi smokey eyes biru, complexion matte, dan bibir maroon membuat penampilan Esther terlihat paling dramatis di antara keempat member.

Baila: Perpaduan Lavender dan Biru

Baila menghadirkan karakter yang menarik karena menggabungkan nuansa dingin pada bagian mata dengan complexion yang lebih hangat.

Eyeshadow lavender dan biru menjadi pusat perhatian. Warna tersebut dibuat dalam bentuk gradasi sehingga memberikan dimensi pada kelopak mata.

Eyelineer sedikit dipertebal pada bagian ujung dengan bentuk winged. Bulu mata yang lentik kemudian memperkuat tampilan mata.

Salah satu detail yang cukup mencolok adalah alis tebal dan natural. Gaya tersebut mengingatkan pada karakter makeup era 1990-an hingga awal 2000-an yang kini kembali mendapat perhatian.

Complexion Baila berada di antara matte dan satin. Efeknya terlihat cukup blurred tetapi tetap memiliki sedikit kesan dewy.

Contour pada pipi, dahi, dan rahang dibuat cukup halus untuk memberikan dimensi. Blush pink lembut serta highlighter tipis pada hidung dan pipi kemudian memberikan efek lebih

bercahaya di bawah lampu. Untuk bibir, Baila menggunakan lip liner cokelat muda yang dipadukan dengan nude pink glossy.

Hasil akhirnya merupakan perpaduan antara nuansa retro dan modern, cukup berwarna, tetapi tetap wearable.

Shaz: Cool Fresh Eyeshadow Biru

Sebagai member termuda, Shaz tampil dengan gaya yang lebih fresh dan modern.

Eyeshadow biru menjadi statement utama. Namun, berbeda dari Esther yang menggunakan biru dalam smokey eyes yang lebih intens, Shaz mempertahankan riasannya agar tetap ringan.

Eyelineer hitam dibuat dengan wing tipis untuk memberikan definisi pada mata tanpa membuat tampilan terlalu berat.

Bulu mata dibuat natural tetapi tetap lentik. Shimmer pada sudut dalam mata memberikan efek mata yang lebih cerah.

Shaz juga menggunakan alis yang tebal tetapi tetap lembut. Detail ini kembali memperlihatkan pengaruh estetika Y2K dalam makeup-nya. Untuk complexion,

Shaz memilih hasil satin dengan efek kulit sehat dan glowing alami. Blush pink dengan sedikit nuansa peach membuat wajah terlihat lebih segar.

Contour dibuat lebih tipis dibandingkan Baila dan Esther. Namun, shading hidung terlihat lebih tegas dan dipadukan dengan highlighter pada tulang hidung serta pipi. (far,ist/dya)

Simalakama Ojol ...dari Hal 1

Pemerintah memastikan status pengemudi ojek online (ojol) akan ditempatkan sebagai pelaku usaha mikro dalam skema Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsekuensinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak diposisikan sebagai hubungan kerja formal. Soal Tunjangan Hari Raya (THR) atau bonus misalnya, bergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Status tersebut akan dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tinggal menyinkronisasi sekitar dua pasal sebelum aturan tersebut dituntaskan.

"Kita lagi mau dalam tahap finalisasi akhir terkait perpres mengenai ekosistem di transportasi digital," kata Maman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

"Jadi tinggal ada beberapa pasal lagi lah yang lagi mau kita sinkronisasi dan finalisasi. Kayaknya sekitar dua pasal tadi. Nah itu nanti akan kita kebut dalam waktu beberapa hari ini," lanjutnya.

Pemerintah menargetkan Perpres Ojol selesai dalam waktu sekitar sepekan atau sebelum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan bersama DPR telah selesai dan pemerintah tinggal menyelesaikan proses administrasi.

"Sabar. Jadi tadi sudah selesai. Semoga bisa sebelum 17 Agustus ya. Ini masalah administrasinya kan," kata Prasetyo, Senin (10/8/2026).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyebut masih ada pembahasan internal untuk mencegah aturan tersebut menimbulkan salah tafsir.

"Kami masih membahas, mendiskusikan. Jadi supaya tidak menimbulkan salah penafsiran, jadi nanti kita tunggu sampai selesai. InsyaAllah kita selesaikan sebelum 17 Agustus," ujar Dudy.

Dia mengatakan perpres ojol hanya mengatur layanan kendaraan roda dua, sementara taksi daring tidak.

Dudy, saat ditemui usai rapat finalisasi perpres tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin mengatakan regulasi yang diatur mencakup layanan pengantaran orang dan barang. "Yang menjadi fokus

pengaturan mengenai hantaran orang dan barang. Roda dua, ya," ucap dia.

Ojol Bukan Pekerja Formal

Maman menegaskan perubahan status tersebut bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah telah menyepakati pengemudi ojol ditempatkan sebagai pengusaha mikro.

"Kalau itu kan memang sudah memang semua sudah sepakat di situ. UMKM, pengusaha mikro," tegas Maman.

Dengan status tersebut, pengemudi ojol tidak dikategorikan sebagai pekerja formal. Konsekuensinya, sejumlah hak yang secara otomatis melekat pada hubungan kerja formal tidak serta-merta berlaku dengan mekanisme yang sama.

Salah satunya adalah Tunjangan Hari Raya (THR) atau bonus. Maman mengatakan pemberian THR maupun bonus kepada pengemudi nantinya akan bergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

"Kalau itu (THR/bonus) kan nanti ada di perjanjian kemitraan. Saya pikir itu biarkan dulu. Itu kan perjanjian kemitraan sifatnya fleksibel, tergantung kesepakatan nanti antara ojol dengan aplikator yang nanti akan dimediasi berdasarkan wewenang di Kementerian UMKM," kata Maman.

Artinya, jika status pengemudi ditempatkan sebagai pelaku usaha mikro, pemberian THR tidak diposisikan sebagai kewajiban yang melekat pada hubungan pekerja-pemberi kerja seperti pada pekerja formal. Mekanismenya akan bergantung pada isi kesepakatan kemitraan.

Klaim Mayoritas Asosiasi Ojol Setuju

Maman menyebut keputusan menjadikan pengemudi ojol sebagai pengusaha mikro diambil setelah pemerintah berdiskusi dengan berbagai komunitas dan asosiasi pengemudi.

Ia mengklaim telah bertemu dengan sekitar 20 asosiasi atau komunitas ojol.

"Saya ini udah ketemu kurang lebih dengan hampir mungkin 20-an asosiasi komunitas ojol, aspirasi mereka semua mayoritasnya ke UMKM. Artinya ke usaha mikro lah gitu," jelas Maman.

Dalam pernyataan lain, Maman mengatakan pembahasan dengan asosiasi menjadi basis pemerintah dalam menentukan arah kebijakan tersebut.

"Kami basisnya bicarakan dengan semua asosiasi. Saya ini sudah ketemu kurang lebih hampir 20-an asosiasi komunitas ojol, aspirasi mereka semua

mayoritasnya ke UMKM, artinya ke usaha mikro," tuturnya.

Namun, perubahan status ini juga memiliki konsekuensi lain. Pemerintah menyebut pengemudi ojol yang masuk kategori usaha mikro dapat memperoleh sejumlah fasilitas yang tersedia bagi pelaku UMKM.

Bebas pajak dan akses KUR

Maman menyatakan pengemudi ojol tidak otomatis dikenai pajak hanya karena dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro.

Ia mengatakan omzet pengemudi ojol pada umumnya berada di bawah batas omzet yang dikenai pajak UMKM.

"Saya luruskan, mereka tidak kena pajak. Dalam aturan insentif UMKM, omzet di bawah Rp500 juta bebas pajak. Ojol kan rata-rata Rp5 juta, Rp10 juta, sampai Rp15 juta per bulan. Jadi 100 persen isu (dikenai pajak) itu hoaks," tegas Maman.

Selain persoalan pajak, pemerintah juga menyebut pengemudi dapat mengakses program pembiayaan UMKM, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga plafon Rp100 juta, sesuai ketentuan program yang berlaku.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan perubahan status tersebut sebagai upaya memberikan akses kepada pengemudi terhadap skema pemberdayaan usaha mikro, bukan sekadar mengubah label profesi.

Namun, konsekuensi terhadap perlindungan kerja juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Ketika hubungan pengemudi dan aplikator dibingkai sebagai kemitraan, sejumlah hak yang selama ini diperdebatkan dalam hubungan kerja formal akan bergantung pada isi perjanjian antara kedua pihak.

Dua Pasal Dirahasiakan

Meskipun pemerintah menyebut status UMKM telah disepakati, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 belum sepenuhnya final.

Maman mengatakan masih ada sekitar dua pasal yang harus disinkronisasi. Ia belum mau mengungkapkan substansi kedua pasal tersebut.

"Nah nanti masih ada beberapa pasal kayaknya sekitar dua pasal lah yang memang perlu finalisasi akhir, yang mohon maaf saya pikir nanti lah nanti aja kami jawab setelah final semuanya biar enggak jadi distorsi isu nanti," imbuh Maman.

Pemerintah menargetkan seluruh proses selesai dalam satu pekan.

"Pokoknya nanti setelah kita finalisasi semua, besok tim eselon 1 kita juga rapat sekali lagi memfinalisasi itu. Insyaallah sih mudah-mudahan dalam satu minggu ini udah tuntas (Perpres Ojol-nya)," kata Maman.

Sementara itu, status Perpres tersebut sebelumnya sempat menjadi

LINIMASA PERKEMBANGAN OJEK DARING DI INDONESIA

2010
Gojek memelopori layanan transportasi daring di Indonesia.

2014:
Perusahaan transportasi daring Uber dan Grab memulai ekspansi layanan di Indonesia.

2015:
Sebanyak 4.000 orang mendaftar sebagai pengemudi ojek daring dalam perekrutan besar-besaran yang diselenggarakan oleh Gojek dan Grab di Jakarta.

2019:
Kementerian Perhubungan menerbitkan payung hukum pertama ojek daring melalui Permenhub Nomor PM. 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

2020-2021:
Akibat pandemi Covid-19 layanan ojek motor sempat dilarang mengangkut penumpang. Perusahaan transportasi daring beralih fokus ke layanan pemesanan dan pengantaran makanan serta barang.

2022:
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 diterbitkan. Aturan mengatur potongan komisi ojek daring/online (ojol) maksimal 20% dari tarif penumpang.

2025:
Berdasar data Kemenhub, jumlah pengemudi ojek daring di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang.



polemik. Pada 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

"Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online," kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional. Prabowo ketika itu menyebut aturan tersebut meningkatkan porsi pendapatan pengemudi.

"Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujarnya.

Namun, pada 2 Juli 2026, Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara Binbin Firman Tresnadi mengatakan Perpres tersebut masih dalam proses administrasi.

"Jadi terkait Perpres Nomor 27 Tahun 2026, saat ini masih dalam proses administrasi, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan dikeluarkan ke publik," kata Binbin kepada massa aksi. (tin,rls,kcm/dya)

MENKO POLKAM DUGA API KEBAKARAN BROMO DIPICU KESALAHAN MANUSIA

Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, terus meluas. Selain Lembah Dingklik, titik api juga terpantau di kawasan Penanjakan dan sekitar P30. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamar Chaniago menduga kebakaran tersebut dipicu kesalahan manusia atau human error. Meski diakui penyebab pasti masih harus dibuktikan melalui penyelidikan di lapangan.

Dugaan itu disampaikan Djamar setelah pemerintah melakukan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut dia, kondisi kawasan Bromo yang dingin memungkinkan pengunjung menyalakan api untuk menghangatkan diri, lalu tidak memastikan api benar-benar padam.

"Bromo ini kan dingin. Kemudian banyak orang di situ datang, mungkin sambil kedinginan-kedinginan dia bakar, gitu ya, atau jangan lupa mungkin memadamkannya," kata Djamar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Djamar juga mengaitkan dugaan tersebut dengan kejadian kebakaran Bromo pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan aktivitas pengunjung pernah diduga berkaitan dengan munculnya api.

"Seperti tahun yang lalu kan orang hanya berfoto-foto saja kan bisa terbakar," ujarnya.

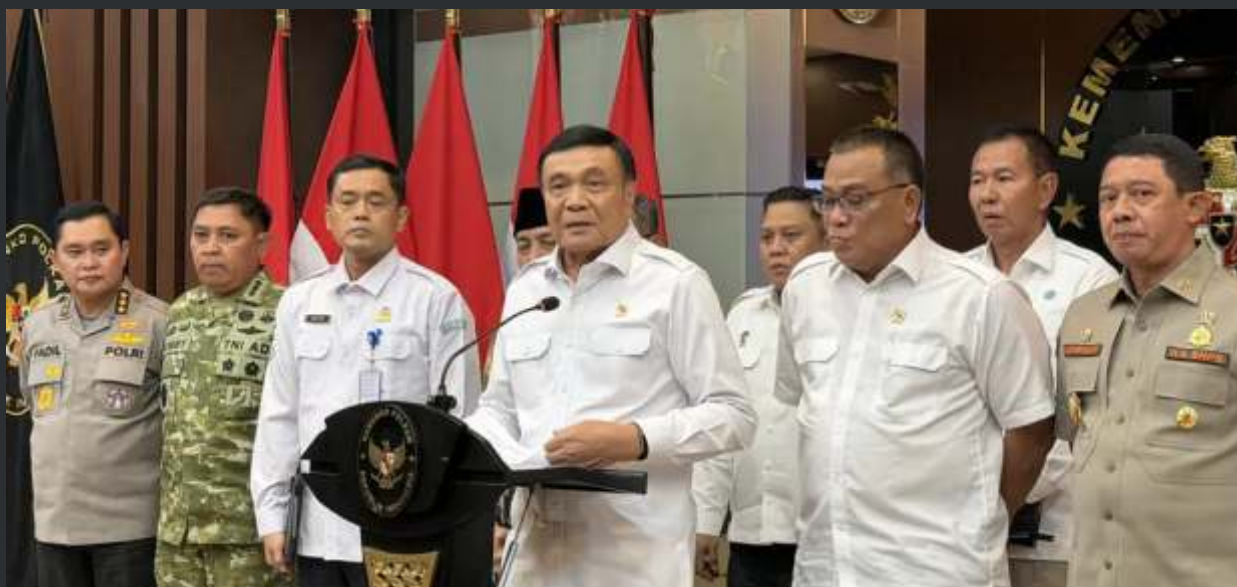
Ketika ditanya apakah kebakaran Bromo lebih mungkin disebabkan faktor manusia dibandingkan faktor alam, Djamar menjawab:

"Kira-kira begitu, karena human error. Iya, human error."

Pernyataan tersebut masih berupa dugaan pemerintah. Belum ada keterangan resmi yang memastikan sumber api berasal dari aktivitas pengunjung tertentu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan yang terbakar di kawasan TNBTS mencapai 520 hektare hingga Minggu (9/8/2026) pukul 23.30 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan api tidak hanya muncul di satu kawasan. Titik kebakaran terpantau di Lembah Dingklik, Penanjakan, Bukit Dingklik,



Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamar Chaniago saat jumpa pers penanganan Karhutla di Kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).ist

sekitar P30 di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, hingga Penanjakan Satu.

"Total lahan terbakar mencapai 520 hektare. Adapun vegetasi terdampak antara lain cemara gunung, mentingen, akasia, dan semak belukar," kata Abdul.

Titik api di Lembah Dingklik dilaporkan sempat membesar. Petugas masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan api dan luas area terdampak.

Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran di kawasan wisata gunung tersebut menjadi persoalan serius. Api tidak hanya mengancam kawasan padang savana, tetapi juga vegetasi yang menjadi bagian dari ekosistem TNBTS.

Pemerintah kemudian menutup akses menuju kawasan Bromo untuk mengurangi risiko terhadap wisatawan sekaligus memudahkan

operasi pemadaman.

Media internasional juga menyoroti kebakaran tersebut. Reuters melaporkan akses ke kawasan Gunung Bromo ditutup setelah kebakaran meluas. Laporan itu menyebut api telah membakar ratusan hektare kawasan taman nasional. Sementara Associated Press melaporkan luasan kawasan yang terdampak kebakaran kemudian diperkirakan lebih besar berdasarkan perkembangan penanganan di lapangan.

Di tengah meluasnya area terdampak, Djamar menyatakan penanganan kebakaran Bromo mulai menunjukkan perkembangan.

"Bromo ini Pak BNPB dan Menteri Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru saja terjadi. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan, tinggal satu titik dua titik saja," kata Djamar.

Total 107.000 Ha Terbakar di RI

Kebakaran Bromo terjadi ketika Indonesia memasuki periode puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau 2026 berlangsung pada Juli-September.

Agustus diperkirakan menjadi bulan dengan cakupan wilayah puncak kemarau paling luas. BMKG mencatat 369 Zona Musim atau sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia

diperkirakan mengalami puncak kemarau pada bulan ini.

Kondisi kering tersebut meningkatkan kerentanan vegetasi terhadap kebakaran. Risiko menjadi lebih besar ketika fenomena El Nino turut memengaruhi pola curah hujan.

Djamar mengatakan El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan bertahan hingga awal September atau Oktober. Karena itu, pemerintah memperkirakan ancaman karhutla belum berakhir meski sejumlah titik api telah berhasil dipadamkan.

"Sampai dengan hari ini, wilayah (hutan) kita di Indonesia ini yang terbakar terhitung 107.000 hektare lebih," ujar Djamar.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah yang mendapat pemantauan ketat karena dinilai paling rawan mengalami kebakaran. Keenamnya adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kemudian, dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis. Ada 6 provinsi," kata Djamar.

"Yang kita waspadai di 6 provinsi itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel," lanjutnya.

Selain wilayah-wilayah tersebut, pemerintah juga memantau kebakaran di kawasan konservasi seperti Bromo dan Gunung Gede Pangrango. (gus,kum,ist,rla/dya)